



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Tlp: 021-7231948
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp: 021-88955882
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0955 /X/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER Ganjil T.A. 2024/2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kep Rektor UBJ No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2024/2025.
7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Semester Ganjil T.A. 2024 / 2025.

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. **Dr. Lia Salsiah, S.H., M.Kn**
2. **Sri Wahyuni, S.H., M.H**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
Nama : DIAN AMANDA PUTRI
NPM : 202110115253
Judul Skripsi : PENGALIHAN UANG KONSUMEN KEDALAM BENTUK DONASI OLEH PELAKU ALFAMART DI KOTA BEKASI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2024/ 2025.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Oktober 2024
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.E., SH., M.M., M.H
NIP. 2401637

**KEWAJIBAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
BAGI PENERIMA WARALABA DALAM
PERJANJIAN BAKU**



SKRIPSI

Oleh:

DIAN AMANDA PUTRI

202110115253

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**KEWAJIBAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
BAGI PENERIMA WARALABA DALAM
PERJANJIAN BAKU**



SKRIPSI

Oleh:

DIAN AMANDA PUTRI

202110115253

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewajiban Pembinaan dan Perlindungan Bagi
Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Baku

Nama Mahasiswa : Dian Amanda Putri

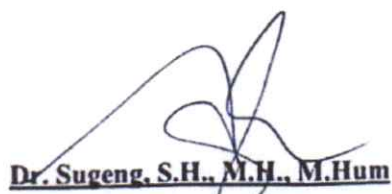
Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115253

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 10 Juni 2025

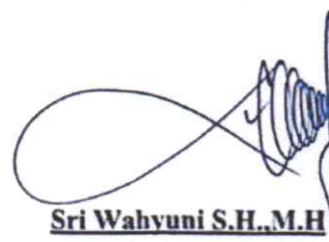
MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum
NIDN. 0304027301

Pembimbing II



Sri Wahyuni S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewajiban Pembinaan Dan Perlindungan Bagi Penerima
Waralaba Dalam Perjanjian Baku
Nama Mahasiswa : Dian Amanda Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115253
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2025

Jakarta, 31 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum
NIDN. 0304027301

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H.,
M.Hum
NIDK. 8976950022

ABSTRAK

Dian Amanda Putri. 202110115253. *“Kewajiban Pembinaan Dan Perlindungan Bagi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Baku”*

Waralaba merupakan bentuk kerja sama dalam bidang usaha yang semakin memperoleh perhatian dalam dunia bisnis modern. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima waralaba umumnya didasarkan pada perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pihak pemberi waralaba. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan serta memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan pihak penerima waralaba. Oleh sebab itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum yang adil dan mendorong terciptanya perjanjian waralaba yang seimbang bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian baku berdasarkan ketentuan PP No. 35 Tahun 2024, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran dalam hubungan waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan teori perlindungan hukum serta teori keadilan. Kajian ini membahas dua putusan pengadilan, yakni Putusan No. 1064 K/Pdt/2020 dan Putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr., yang mencerminkan penggunaan jalur hukum sebagai cara penyelesaian sengketa akibat ketidakseimbangan dalam perjanjian waralaba baku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 35 Tahun 2024 telah menyediakan dasar perlindungan hukum yang cukup memadai, namun dalam prakteknya masih ditemukan perjanjian yang merugikan pihak penerima waralaba. Apabila upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil, penyelesaian melalui pengadilan menjadi langkah hukum represif yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, waralaba, perjanjian baku, sengketa, litigasi.

ABSTRACT

Dian Amanda Putri. 20210115253. "The Obligations Of Guidance And Protection For Franchisees In Standard Agreements"

Franchise is a form of business cooperation that is increasingly gaining attention in the modern commercial world. The legal relationship between franchisor and franchisee is typically based on a standard contract unilaterally prepared by the franchisor. This situation can lead to imbalances and unfair provisions that disadvantage the franchisee. Therefore, through Government Regulation No. 35 of 2024 on Franchising, the government seeks to provide fair legal protection and encourage more balanced franchise agreements between the parties. This study aims to examine the form of legal protection for franchisees in standard contracts under Government Regulation No. 35 of 2024 and to analyze the dispute resolution mechanisms in the event of violations within the franchise relationship. The research method used is normative legal research, employing a statutory and case-based approach. The data consist of secondary legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed descriptively and analytically using the theory of legal protection and the theory of justice. This paper discusses two court decisions: Decision No. 1064 K/Pdt/2020 and Decision No. 3/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr. These cases reflect the use of legal remedies as a form of dispute resolution arising from imbalances in standard franchise agreements. The findings indicate that while Government Regulation No. 35 of 2024 provides an adequate legal framework for protection, in practice, franchise agreements that harm franchisees still persist. When amicable resolutions fail, legal proceedings become a form of repressive legal protection that offers legal certainty and justice to the affected party.

Keywords: legal protection, franchise, standard agreement, dispute, litigation.